

KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kab/Kota Bukittinggi

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OPD, Bidang dan Seksi yg memproses PBG dan SLF (SIMBG)?	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, Bidang Cipta Karya 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi	
2	Berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF? (dari penyiapan data sampai rekomendasi teknis)	± 20 Hari Kerja	
3	Berapa rata-rata waktu real pengurusan PBG dan SLF? (terbitnya PBG)	Untuk dokumen yang lengkap, rata-rata pengurusan PBG dan SLF sekitar 15 hari kerja	
4	Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?	1. Masyarakat umum masih ada yang belum mengerti dengan penggunaan aplikasi SIMBG, contohnya tidak bisa membuat akun sendiri, serta tidak mengecek proses PBG yang berlangsung di akun Pemohon 2. Masyarakat tidak mengetahui perbedaan syarat pengurusan PBG untuk hunian dan kepentingan umum 3. Masih ada masyarakat yang tidak bisa membedakan pengurusan PBG dan SLF, kadang bangunan sudah berdiri lama, tetapi pemohon masih mengurus PBG, bukan SLF 4. Terlalu besar biaya untuk Jasa Perencana Konstruksi, sementara desain prototipe dari Pemda masih belum ada	
5	Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF (OPD Teknis) ?	1. Operator pemeriksa tidak mengetahui permohonan PBG tersebut untuk bangunan baru atau sudah berdiri, karena keterbatasan operator untuk mengecek ke lapangan 2. PBG kolektif nanti keluar hanya 1 PBG kolektif, sedangkan developer butuh 1 PBG untuk 1 bangunan 3. Perhitungan retribusi untuk prasarana tidak ada faktor kepemilikan, sehingga untuk bangunan milik negara tetap membayar retribusi untuk prasarana	

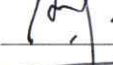
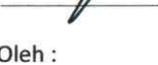
NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Sudah berapa PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)	TAHUN 2021 Jumlah Permohonan = 150 Jumlah Terbit = 126 Jumlah Ditolak = 0 Jumlah dalam persen (%) = 84% TAHUN 2022 Jumlah Permohonan = 248 Jumlah Terbit = 208 Jumlah Ditolak = 0 Jumlah dalam persen (%) = 83,87% TAHUN 2023 Jumlah Permohonan = 235 Jumlah Terbit = 181 Jumlah Ditolak = 0 Jumlah dalam persen (%) = 77,02% TAHUN 2024 s.d Oktober 2024 Jumlah Permohonan = 148 Jumlah Terbit = 89 Jumlah Ditolak = 0 Jumlah dalam persen (%) = 60,14%	
7	Berapa orang Tim Profesional Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) di Kab/Kota ...	1. TPA sebanyak 5 orang 2. TPT sebanyak 5 orang	TPA: 1. Dr. Eng. Muhammad Ridwan, S.T., M.T. 2. Saiful Mustofa, S.T., M.T. 3. Deni Irda Mazni, S.T., M.T. 4. Mahyessi Kamil, S.T., M.T. 5. Kris Budiarto Diar, S.T., IAI, AA TPT: 1. Indra Susanto, S.T. 2. Eka Rahmi Oktaviana, S.T. 3. Octaviandri, S.T. 4. Firmansyah, S.T. 5. Dian Amelia Sari, A.Md.
8	Apakah penyelenggara PBG melaksanakan sosialisasi dan dalam bentuk apa?	Ada	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Apakah penetapan SHST oleh Kepala Daerah ? Kalau belum apa sebabnya?	Ada. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-119-2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2024	
10	Apakah Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota sudah mempunyai PBG dan SLF?	Belum	
11	Berapa Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF dari jumlah total BGN di Kabupaten/ Kota ?	0%	
12	Pada SIMBG terdapat proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, di antara item ini proses apa saja yg sudah dilaksanakan penyelenggaran SIMBG ?	PBG dan SLF	SBKBG belum terakomodir pada menu SIMBG
13	Kalau belum semua, apa penyebabnya?	Belum ada permohonan dari masyarakat	
14	Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah diterbitkan?	Belum dilaksanakan	
15	Apakah ada sanksi pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yang tidak sesuai PBG yg sudah diterbitkan (luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk sanksinya ?	Belum ada sanksi	
16	Dalam penyelenggaraan PBG dan SLF apakah sudah mengacu sepenuhnya pada PP No. 16 Tahun 2021?	Sudah	
17	Terkait dengan retribusi, apakah sudah ada Perda retribusi untuk PBG dan SLF?	Sudah, Perda Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
18	Apakah ada aturan-aturan tambahan yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait PBG dan SLF?	Tidak	
19	Apakah sudah ada Perda RDTR dan RTBL, kalau belum prosesnya sudah sampai dimana?	Ada	
20	OPD Teknis, apakah sudah ada tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara yang bersertifikat ? Kalau ada, berapa orang?	Ada, sebanyak 2 orang	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)

Bukittinggi, 15 Oktober 2024

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
UPTD P2BG Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

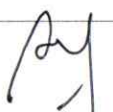
1.	<u>HENDRI YANI</u>	<u></u>
2.	<u>INDRA SUSANTO</u>	<u></u>
3.	<u>Fajrida Sari</u>	<u></u>
4.	<u>FRISKA MIRZA FAIRUZ</u>	<u></u>
5.	<u>ETI ANDRYA</u>	<u></u>

Diketahui Oleh :

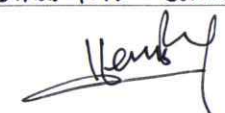
Kepala UPTD P2BG
Dinas BMCKTR Prov. Sumbar



Yudi Herawan, S.T., M.T.
Nip. 19740311 199803 1 003


INDRA SUSANTO, S.T
NIP. 19760910 201001 1003

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Bukittinggi



HENDRI YANI, ST. MT, M.Sc
NIP. 19790708 200412 2005